

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau



OLEH:

M. RIZKI ZASMA
NPM: 137310108

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 05
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
ADIWIYATA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN
KAMPAR**

ABSTRAK

M. RIZKI ZASMA

Lembaga pendidikan sangat berperan dalam menumbuhkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Oleh karena itu, program Adiwiyata harus dilaksanakan dengan baik. Namun, di Kabupaten Kampar sekolah setingkat SMP masih rendah minatnya untuk mewujudkan sekolah berbasis lingkungan atau sekolah adiwiyata jika dibandingkan dengan jumlah sekolah tingkat SMP yang tersebar di Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar. Metode penelitian ini adalah *survey deskriptif*. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 14 orang dengan teknik penarikan sampel secara sensus, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Sampel terpilih kemudian ditetapkan menjadi responden. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah kuisisioner, wawancara dan dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar kurang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi tanggapan dari responden tentang implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dari sub indikator komunikasi dalam kategori pengukuran kurang terlaksana, sumber daya dalam kategori pengukuran kurang terlaksana, disposisi dalam kategori kurang terlaksana dan struktur birokrasi juga dalam kategori kurang terlaksana. Saran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: bagi dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mengevaluasi pelaksanaan program Adiwiyata agar di masa mendatang pelaksanaan program Adiwiyata ini dapat berjalan lebih baik dan kepada pihak sekolah agar terus bekerja sama karena memiliki peranan yang sangat penting mencapai keberhasilan program-program program adiwiyata.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Adiwiyata.

**IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT POLICY
NUMBER 05 YEAR 2013 GUIDANCE ADIWIYATA FIRST LEVEL
SECONDARY SCHOOLS IN THE DISTRICT KAMPAR**

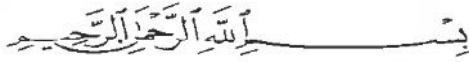
ABSTRACT

M. RIZKI ZASMA

Educational institutions play an important role in fostering students' concern for the environment. Therefore, the Adiwiyata program must be implemented properly. However, in Kampar District, junior-level schools were still low in their interest in realizing environment-based or adiwiyata schools compared to the number of junior-level schools spread in Kampar District. The purpose of this study was to determine the implementation of the Minister of Environment's policy No. 05 of 2013 concerning Guidelines for the Implementation of Adiwiyata Junior High School Level Programs in Kampar District. Met o de of this research is survey descriptive. The population in this study amounted to 14 people with census sampling techniques, namely the entire population was sampled. The selected sample is then assigned to be the respondent. The collection techniques used are questionnaire, interview and documentation and observation. The results showed that the implementation of the Minister of Environment's policy number 05 of 2013 concerning the Implementation Guidelines for the Adiwiyata Junior High School Level Program in Kampar District was less implemented. This can be seen from the recapitulation of responses from respondents regarding the implementation of the Minister of Environment's policy number 05 of 2013 concerning the Implementation Guidelines for the Adiwiyata Junior High School Level Program in Kampar District, from the sub-indicators of communication in the measurement category that was not implemented, the resources in the measurement category were not implemented, disposition in the material is less implemented and the bureaucratic structure is also in the less implemented category. Suggestions raised in this study are: for the Kampar District Education Office, the existence of this research is expected to be able to evaluate the implementation of the Adiwiyata program so that in the future the implementation of the Adiwiyata program can run better and to the schools to continue to work together because it has a very important role achieve success adiwiyata programs.

Keywords: Implementation, Policy, Adiwiyata Program.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Implementasi Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar”. Penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Budi Muliando, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali.,M.Si selaku pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
5. Bapak Andriyus, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat membimbing penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
7. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;

8. Terima kasih tak terhingga buat kedua orang tua yang tetap setia dan selalu mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini;
9. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, Agustus 2019
Penulis,

M. Rizki Zasma

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	11
BAB II STUDY KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
A. Studi Kepustakaan.....	13
B. Kerangka Pikiran	34
C. Hipotesis	34
D. Konsep Operasional.....	35
E. Operasional Variabel.....	36
F. Ukuran Variabel	37
G. Teknik Pengukuran.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel.....	41
D. Teknik Penarikan Sampel.....	41

E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisa Data	44
H. Jadwal Penelitian	45
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar	46
B. Gambaran Umum Program Adiwiyata	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Identitas Responden.....	64
B. Implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar	66
BAB VI PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Di Indonesia, dalam upaya mempercepat pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup khususnya jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan telah mencanangkan Program Adiwiyata, dengan tujuan mendorong dan membentuk sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan.

Dasar hukum penyelenggaraan program Adiwiyata ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, dan mengalami perubahan (Revisi) menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Program Adiwiyata dilaksanakan guna mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan

berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan misalnya pengolahan limbah, pramuka Saka Taruna Bumi, penanggulangan banjir, kantin dan sekolah sehat dan sebagainya. Dengan melaksanakan program Adiwiyata akan menciptakan warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah. Pelaksanaan Program Adiwiyata diletakkan pada dua prinsip dasar berikut ini:

1. Partisipatif: Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran.
2. Berkelanjutan: Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif.

Melalui program Adiwiyata diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif. Program Adiwiyata dikembangkan berdasarkan norma-norma dalam perikehidupan yang antara lain meliputi: kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sangat banyak manfaat yang diperoleh sekolah maupun warga sekolah dengan mengikuti program Adiwiyata. Setidaknya ada 5 manfaat mengikuti Program Adiwiyata, yaitu:

1. Mendukung percepatan pencapaian 8 isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan

pembiayaan, dan penilaian) sebagaimana diatur dalam PP No. 19 tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan (standar

2. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan energi.
3. Menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif.
4. Menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar.
5. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah.

Adiwiyata merupakan sebuah penghargaan bagi sekolah yang telah menerapkan pendidikan lingkungan hidup. Penghargaan Adiwiyata diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada sekolah yang mampu melaksanakan upaya peningkatan pendidikan lingkungan hidup secara benar, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, menyebutkan beberapa aspek yang dijadikan indikator untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata, yaitu:

- 1) Kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, memiliki standar:

- a) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, memiliki standar:
 - a) Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup;
 - b) Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif memiliki standar:
 - a) Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah;
 - b) Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak, antara lain masyarakat, pemerintah, swasta, media, dan sekolah lain.
- 4) Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan memiliki standar:
 - a) Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan;
 - b) Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di sekolah.

Pelaksana program Adiwiyata terdiri dari tim nasional, propinsi, kabupaten/kota juga di sekolah. Unsur dan peran masing-masing tim seperti tercantum dibawah ini;

1. Tim Nasional

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut: Kementerian Lingkungan Hidup (Koordinator), Kementerian pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, LSM pendidikan lingkungan, perguruan tinggi, media serta swasta. Tim tingkat Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup.

Peran dan tugas pokok dari tim nasional adalah sebagai berikut;

- a. Mengembangkan kebijakan, program, panduan, materi pembinaan dan instrumen observasi
- b. Melakukan Koordinasi dengan Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) dan Propinsi
- c. Melakukan Sosialisasi program dengan Propinsi
- d. Melakukan Bimbingan teknis kepada Tim Propinsi dalam rangka pembinaan sekolah
- e. Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional
- f. Melakukan Evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program Adiwiyata kepada Menteri lingkungan Hidup tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

2. Tim Propinsi

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut : Badan Lingkungan Hidup Propinsi (koordinator), Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, LSM pendidikan lingkungan, media massa, perguruan tinggi serta swasta, Tim propinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.

Peran dan tugas pokok dari tim provinsi adalah sebagai berikut;

- a. Mengembangkan program Adiwiyata tingkat Propinsi
- b. Koordinasi dengan kabupaten/kota
- c. Melakukan Sosialisasi program ke kabupaten/kota
- d. Bimbingan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pembinaan sekolah
- e. Membuat Pilot project untuk 4 satuan pendidikan yang berbeda (SD, SMP, SMA, SMK) setiap propinsi
- f. Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Propinsi
- g. Melakukan Evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program Adiwiyata kepada Gubernur tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup

3. Tim Kabupaten/Kota :

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut: Badan Lingkungan Kabupaten/Kota (koordinator), Dinas pendidikan, Kantor agama, LSM pendidikan lingkungan, media, perguruan tinggi, swasta, sekolah Adiwiyata mandiri. Tim kabupaten ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Peran dan tugas pokok dari tim kabupaten/kota adalah sebagai berikut;

- a. Mengembangkan/ Melaksanakan program Adiwiyata tingkat Kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi program adiwiyata kepada sekolah
- c. Bimbingan teknis kepada sekolah
- d. Membuat Pilot project untuk 4 satuan pendidikan yang berbeda (SD, SMP, SMA, SMK) setiap Kabupaten/Kota
- e. Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten/ Kota
- f. Melakukan Evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program Adiwiyata kepada Bupati/Walikota tembusan kepada Badan Lingkungan Hidup Propinsi .

4. Tim Sekolah

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut : guru, siswa dan komite sekolah. Tim sekolah di tetapkan melalui SK Kepala Sekolah.

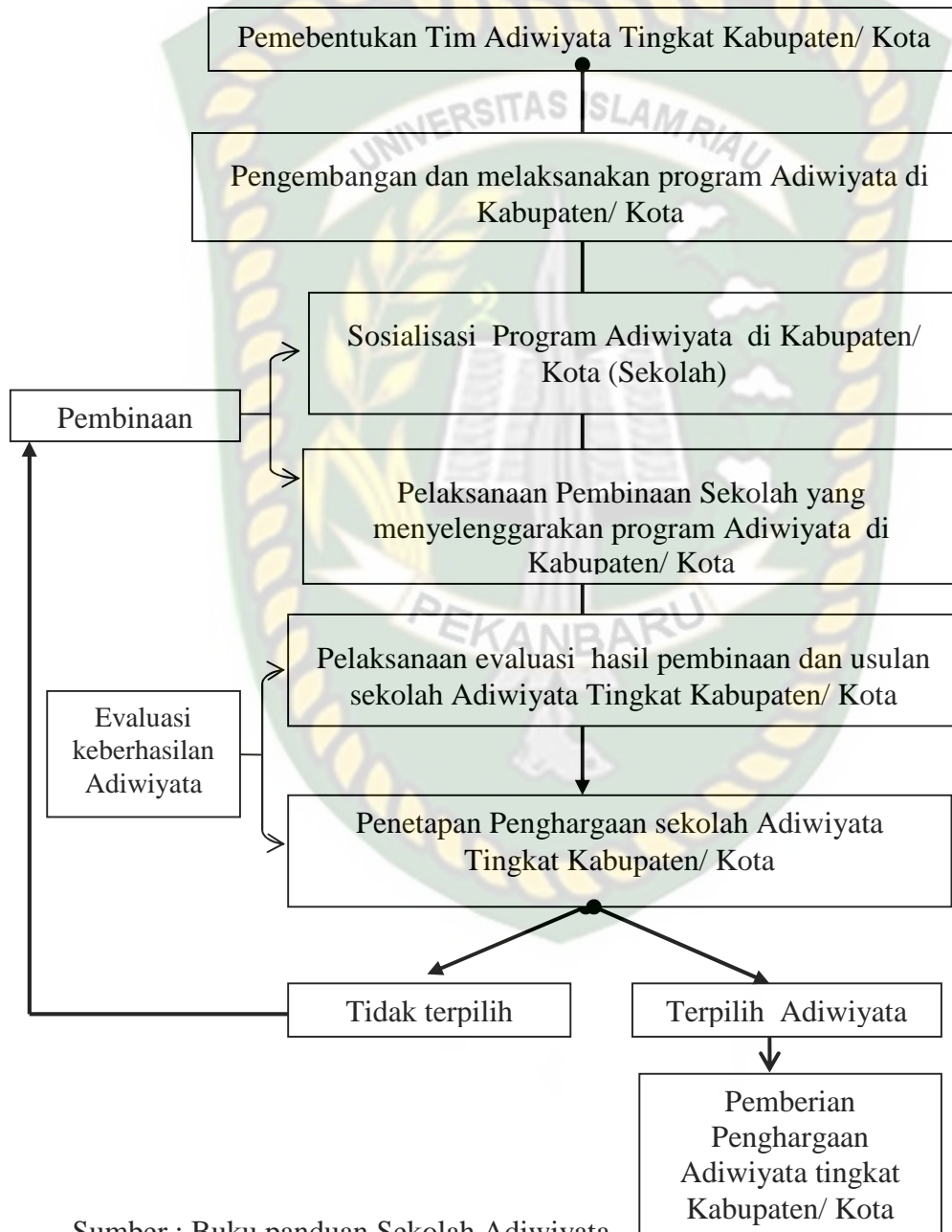
Peran dan tugas pokok dari tim sekolah adalah sebagai berikut ;

- a. Mengkaji kondisi lingkungan hidup sekolah, kebijakan sekolah, kurikulum sekolah, kegiatan sekolah, dan sarana prasarana
- b. Membuat rencana kerja dan mengalokasikan anggaran sekolah berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, dan disesuaikan dengan komponen, standar, dan implementasi adiwiyata
- c. Melaksanakan rencana kerja sekolah
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi.
- e. Menyampaikan laporan kepada Kepala Sekolah tembusan Badan Lingkungan hidup Kabupaten/Kota dan Instansi terkait.

Mekanisme pelaksanaan program sekolah adiwiyata tingkat

Kabupaten/Kota dalam bentuk flow chart berikut ini:

Bagan 1.1 Flow chart Mekanisme Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Kabupaten/Kota



Sumber : Buku panduan Sekolah Adiwiyata.

Anggaran merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan kebijakan apabila suatu kebijakan dirancang dengan baik namun dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan, maka akan sulit untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut dengan maksimal. Untuk melaksanakan kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 alokasi dana dianggarkan sebanyak 20 % dari total anggaran sekolah.

Dalam penyelenggaraan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kampar dibentuk Tim Penilai dan Tim Pembina serta Tim Teknis. Berikut adalah Tim Penilai dan Tim Pembina serta Tim Teknis sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kampar.

Tabel 1.1 Tim Penilai Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kampar.

No	Keterangan	Instansi/Jabatan	Jumlah
1	Penanggung jawab	Kepala BLH Kab. Kampar	1 orang
2	Pembina	Sekretaris BLH Kab. Kampar	1 orang
3	Ketua	Kabid. PK-PL BLH Kab. Kampar	1 orang
4	Sekretaris	Kasubbid. Pengendalian Kerusakan BLH Kota Pekanbaru	1 orang
5	Anggota	Staf BLH Kab. Kampar	5 orang

Sumber: BLH Kabupaten Kampar

Adapun peran dan tugas pokok dari Tim Penilai sekolah Adiwiyata adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penilaian administrasi dan verifikasi ke sekolah- sekolah calon sekolah adiwiyata Kabupaten Kampar.
2. Membuat laporan hasil penilaian yang menjadi dasar pengajuan penerima anugerah Adiwiyata tingkat Kabupaten Kampar dan usulan calon sekolah

Adiwiyata Tingkat Provinsi Riau.

Tabel 1.2 Tim Pembina Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kampar.

No	Keterangan	Instansi/Jabatan	Jumlah
1	Ketua	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Kampar	1 orang
2	Sekretaris	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kampar	1 orang
3	Anggota	Staf BLH dan Dinas Pendidikan	3 orang

Sumber: BLH Kabupaten Kampar

Adapun peran dan tugas pokok dari Tim Pembina sekolah Adiwiyata adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan/melaksanakan Program Adiwiyata.
2. Melakukan sosialisasi program Adiwiyata terhadap semua tingkatan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK.
3. Melakukan bimbingan teknis terhadap sekolah binaan Adiwiyata.

Tabel 1.3 Tim Teknis Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kampar.

No	Keterangan	Instansi/Jabatan	Jumlah
1	Ketua	Kabid Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan	1 orang
2	Sekretaris	Kasubbid Pemulihan Lingkungan	1 orang
3	Anggota	Staf BLH	2 orang

Sumber: BLH Kabupaten Kampar.

Adapun peran dan tugas pokok dari Tim Teknis sekolah Adiwiyata adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan kepada calon sekolah Adiwiyata Kabupaten Kampar sesuai dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan Sekolah Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

2. Melakukan evaluasi, monitoring perkembangan Adiwiyata Kabupaten kampar.
3. Memfasilitasi forum Sekolah Adiwiyata Kabupaten Kampar.

Berikut adalah jumlah SMP/MTs di Kabupaten Kampar berdasarkan Kecamatan.

Tabel 1.4 Jumlah Sekolah Tingkat SMP di Kabupaten Kampar Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah	
		Negeri	Sawsta
1	Kampar Kiri	3	1
2	Kampar Kiri Hulu	8	-
3	Kampar Kiri Hilir	4	1
4	Kampar Kiri Tengah	4	-
5	Gunung Sahilan	3	-
6	IIIK Koto Kampar	3	-
7	Koto Kampar Hulu	3	2
8	Kuok	3	1
9	Salo	2	-
10	Tapung	10	4
11	Tapung Hulu	7	3
12	Tapung Hilir	6	1
13	Bangkinag	2	2
14	Bangkinang Seberang	3	2
15	Kampar	5	-
16	Kampar Timur	2	1
17	Rumbio Jaya	4	-
18	Kampar Utara	2	-
19	Tambang	7	2
20	Siak Hulu	6	3
21	Perhentian Raja	2	-
Jumlah		89	23

Sumber: BPS Kabupten Kampar.

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa jumlah sekolah setingkat SMP di Kabupaten Kampar yang berstatus negeri adalah sebanyak 89 dan yang berstatus swasta adalah sebanyak 23 sekolah.

Berikut adalah data rekapitulasi sekolah setingkat SMP yang sukses mengembangkan program pendidikan berbasis lingkungan atau dikenal dengan sebutan sekolah berbasis Adiwiyata di Kabupaten Kampar.

Tabel 1.5 Sekolah Setingkat SMP Penerima Penghargaan Adiwiyata di Kabupaten Kampar.

No	Sekolah	Alamat	Jenis Penghargaan
1	SMPN 1 Bangkinang	Jl. Olahraga. Bangkinang	Adiwiyata Nasional
2	SMPN 1 Siak Hulu	Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu	Adiwiyata Kabupaten
3	SMPN 1 Kuok	Kecamatan Kuok	Adiwiyata Provinsi
4	SMPN 1 Kampar Kiri Tengah	Bina Baru Kec. Kampar Kiri Tengah	Adiwiyata Nasional
5	MTsN Model Kuok	Kecamatan Kuok	Adiwiyata Nasional
6	MTsN Kampar	Kecamatan Kampar Timur	Adiwiyata Kabupaten

Sumber: BLH Kabupaten Kampar

Dari Tabel diatas dapat dilihat sekolah setingkat SMP di Kabupaten Kampar yang berhasil meraih penghargaan adiwiyata adalah sebanyak 6 sekolah, yaitu adiwiyata Kabupaten sebanyak 2 sekolah, adiwiyata provinsi sebanyak 1 sekolah dan adiwiyata nasional sebanyak 3 sekolah. Dengan demikian sekolah setingkat SMP di Kabupaten Kampar masih rendah minatnya untuk mewujudkan sekolah berbasis lingkungan atau sekolah adiwiyata jika dibandingkan dengan jumlah sekolah tingkat SMP yang tersebar di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil observasi penulis, dalam implementasi kebijakan sekolah berbasis lingkungan melalui program Adiwiyata di Kabupaten Kampar terdapat fenomena. Fenomena tersebut antara lain:

1. Sosialisasi program adiwiyata belum menjangkau seluruh sekolah, sehingga sebagian warga sekolah kurang mengenal maksud dan tujuan program Adiwiyata. Sehingga sekolah setingkat SMP di Kabupaten Kampar masih

rendah minatnya untuk mewujudkan sekolah berbasis lingkungan atau sekolah adiwiyata jika dibandingkan dengan jumlah sekolah tingkat SMP yang tersebar di Kabupaten Kampar

2. Anggaran 20 % dari total anggaran sekolah yang digunakan untuk pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar belum mencukupi.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian fenomena di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu: Bagaimanakah implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
2. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar.

B. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar.
2. Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.
3. Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-phak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang mendapatkan akhiran-an terdapat kecendrungan perbedaan. Kata pemerintah menunjuk kepada individu-individu atau jawatan atau alat-alat perlengkapan negara, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara-cara atau rumusan memerintah, misalnya pemerintahan yang adil, pemerintahan demokratis, pemerintahan diktator dan lain sebagainya, (dalam Tandjung, 2003: 4).

Menurut Sedarmayanti (2004:9), pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang

dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Strong dalam Syafiie (2005:22) mengemukakan pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai

ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000: 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 2005:7).

Menurut Kuper (2000:417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurutu Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut

dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2010,20).

2. Pemerintahan Daerah

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa”Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Penjelasan Pasal 18, Bab VI Undang-Undang 1945 menerangkan bahwa karena Negara Indonesia itu adalah suatu Negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang juga berbentuk Negara. Daerah Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka. Semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah karena didaerahpun pemerintahan akan bersendikan dasar permusyawaratan. Pada pasal 18 Undang-Undang 1945 dijelaskan bahwa

wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Asas desentralisasi adalah yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Asas dekosentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyaakan tugas serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembangkan atas dasar keuthan Negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah kepala

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kebijakan Publik

Kajian teori tentang kebijakan publik dalam bidang pendidikan akan diawali dengan kajian pengertian kebijakan publik karena kajian teori tersebut sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan salah satu kebijakan publik tentang program Adiwiyata. Program Adiwiyata seperti yang diuraikan pada bagian latar belakang penelitian merupakan amanah Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebuah kebijakan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, dan mengalami perubahan (Revisi) oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Menurut Anderson, konsep kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno. 2014:21).

Kebijakan menurut Islamy dalam Suwitri (2011:61) meskipun merupakan kata sudah sangat dikenal dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kata kebijakan memiliki konotasi yang berbeda dengan kebijaksanaan. Kedua kata yang sering dicampur adukkan ternyata memiliki makna yang sangat berbeda. Kebijaksanaan berasal dari kata *wisdom*, sedangkan kebijakan berasal dari kata *policy*. Keduanya membutuhkan syarat-syarat yang berbeda dalam

pelaksanaannya. Kebijaksanaan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh, sementara kebijakan dalam pelaksanaannya mencakup peraturan-peraturan di dalamnya dan sangat berkaitan dengan proses politik. Pendapat Islamy tersebut berbeda dengan Abidin (2004:112) yang tidak membedakan makna antara kata kebijakan dan kebijaksanaan selama kedua istilah itu diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan untuk masyarakat umum.

Ketika berbicara tentang kajian dan praktik kebijakan publik, Samudra (1994:52) menguraikan bahwa ada tiga cakupan yang menonjol yang berkaitan dengan kajian dan praktik kebijakan publik. *Pertama* posisi kebijakan publik yang strategis dalam penentuan arah umum yang harus ditempuh untuk mengelola isu-isu yang ada di masyarakat, *kedua* menentukan ruang lingkup masalah yang dihadapi pemerintah, dan *ketiga* kemampuannya untuk mengetahui atau memetakan ukuran besarnya organisasi publik. Ketiga poin tersebut membuka wawasan kita bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang riil dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah, antara individu dan Negara. Kebijakan publik adalah sebuah respon atas apa yang sedang terjadi di masyarakat juga mencerminkan tentang apa-apa yang diinginkan untuk terjadi dan berubah dalam sebuah masyarakat.

Sementara Thomas Dye dalam Subarsono (2005:2) mendefinisikan kebijakan publik atau kebijakan Negara sebagai "*whatever governments choose to do or not to do*" (Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Amara Raksasataya dalam Islamy juga mengemukakan bahwa

kebijakan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Berbeda dengan James E.Anderson dalam Subarsono (2006:2) kebijakan publik adalah sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industry, pertahanan, dan sebagainya, meskipun ada para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

Dalam dimensi subjek Abidin (2004:121) kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat dianggap kebijakan yang resmi sehingga kebijakan tersebut mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk patuh dan melaksanakan kebijakan tersebut. Wibowo (2004:56) memandang pemerintah sebagai suatu organisasi yang dibentuk sebagai hasil musyawarah atau konsensus dari semua pelaku politik baik pelaku individu maupun kelompok dan organisasi.

Menurut Nugroho (2009:135) kebijakan dalam arti peraturan perundangan mempunyai sejumlah bentuk, untuk Indonesia kita melihat tiga jenis kebijakan publik, yaitu yang dibuat oleh legislatif, eksekutif dan legislatif bersama eksekutif (dan sebaliknya)

Dunn dalam Wibowo (2004:70) mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan kebijakan, pemerintah melakukan aksi dan tindakan yang berupa:

1. Penghimpunan sumber daya yang disebut input kebijakan
2. Pengelolaan sumber daya yang disebut proses/implementasi kebijakan, dimana dalam tahapan ini terdapat perilaku administratif, organisasional, dan politis.

Menurut peneliti kebijakan Kementerian Negara Lingkungan Hidup yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata merupakan kebijakan publik yang strategis untuk mendukung pengembangan pelaksanaan pendidikan berwawasan lingkungan melalui program Adiwiyata.

2. Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan harus dapat diimplementasikan. Meter dan Horn dalam Wibowo (2004:92) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Implementasi kebijakan bisa didefinisikan juga sebagai cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Dwijowijoto dalam Syafaruddin, 2008:78).

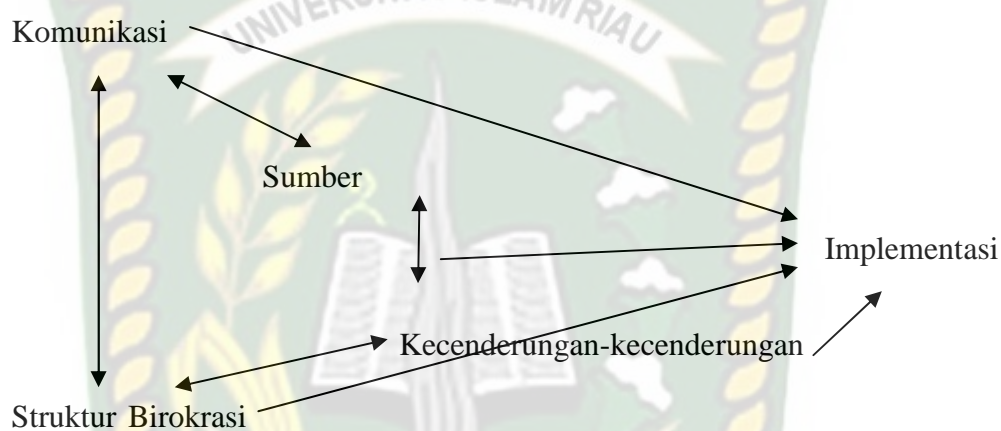
Ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan

(Nugroho, 2009:145).

Dalam proses implementasi terdapat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi, faktor-faktor ini juga secara tidak langsung mempengaruhi implementasi,

faktor-faktor juga secara tidak langsung mempengaruhi implementasi kebijakan melalui dampak pada masing-masing faktor. Dengan perkataan lain, komunikasi mempengaruhi sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi yang pada gilirannya mempengaruhi implementasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Bagan 1.1 Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi
Sumber: Winarno, (2014:180)

Menurut Edwards terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi (Winarno, 2014:156-179).

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan oleh implementor kepada kelompok sasaran atau *target group* untuk mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan memunculkan resistensi dari kelompok sasaran. Para implementor harus

secara intensif melakukan berbagai cara untuk mensosialisasikan tujuan dan manfaat dari pelaksanaan sebuah kebijakan.

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas hal-hal yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat.

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana, dimana komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Menurut Winarno (2014:157) ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

1. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

2. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Dalam hal ini sumberdaya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaksana kebijakan.

Ada dua indikator menurut Winarno, (2014:165) yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek sumberdaya ini, yaitu:

- a. Kualitas pelaksana, seperti staf yang cukup dari segi jumlah.
- b. Kuantitas pelaksana, seperti memadai dan berkompeten dibidangnya.

3. Disposisi

Adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementer dari program, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedang apabila implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Edwards dalam Winarno (2014:166) menyatakan bahwa dua aspek yang perlu diperhatikan dalam mengatasi dampak dari sikap birokrat/pelaksana yang seringkali mengesampingkan implementasi kebijakan yang telah dibuat, yaitu:

- a. Penempatan pegawai (*staffing the bureaucracy*), dimana sikap dari para aparat birokrasi kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap ataupun cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Apabila mendapat masalah dalam implementasi kebijakan khususnya dari perilaku aparat birokrasi pelaksana. Hal ini diselesaikan dengan mempertimbangkan pengangkatan eksekutif, sistem pelayanan publik, sistem aturan kepegawaian dan metode-metode personel yang sudah ada.

b. Insentif (*incentives*), dimana mengganti susunan pegawai pada birokrasi pemerintahan adalah hal yang tidak mudah dan hal tersebut tidak menjamin proses implementasi berjalan lancar. Teknik lain yang dapat digunakan adalah dengan mengubah insentif. Memanipulasi atau mengubah insentif pembuat kebijakan pada level atas diharapkan dapat mempengaruhi kinerja atau tindakannya.

4. Struktur birokrasi.

Menurut Winarno (2014:171) struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Edwards menyatakan bahwa aspek-aspek dari struktur birokrasi, yaitu:

- a. Adanya suatu SOP (*Standard Operation Procedure*) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksana program. SOP juga memberikan keseragaman dalam tindakan para pegawai dalam organisasi yang kompleks dan luas, dimana dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan fleksibilitas yang sangat baik (seseorang dapat dipindahkan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain) serta adanya keadilan dalam pelaksanaan aturan.
- b. Fragmentasi (*fragmentation*) adalah adanya penyebaran tanggung jawab pada suatu area kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Adapun akibat dari adanya fragmentasi, yaitu menyebabkan penyebaran tanggung jawab dan hal ini mengakibatkan koordinasi kebijakan menjadi sulit, dimana sumber daya dan kebutuhan atas

kebutuhan atas kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang timbul kadangkala tersebar di antara beberapa unit birokrasi. Oleh sebab itu perlu adanya kekuatan pemusatan koordinasi antara unit-unit yang terkait dan hal tersebut bukan hal yang mudah.

3. Kebijakan Program Adiwiyata

Kebijakan program Adiwiyata di Indonesia disusun untuk menciptakan iklim yang mendorong semua pihak agar berperan dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup untuk pelestarian lingkungan hidup. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, pendidikan lingkungan diwujudkan sebagai program pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan. Selain itu Retno Soetaryono (2005:8) menambahkan pendidikan lingkungan hidup memberikan pemahaman kepada individu maupun sekelompok individu tentang isu-isu lingkungan, dan keterampilan untuk berpartisipasi serta mengambil tindakan dalam pemecahan masalah lingkungan.

Pendidikan lingkungan menjadi salah satu komponen paling penting dari strategi nasional. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan bahwa pendidikan lingkungan hidup harus dikenalkan disemua jenis pendidikan baik formal, non formal maupun informal. Pengajaran Pendidikan Lingkungan Hidup pada jalur formal yang tidak lain melalui sekolah dapat ditempuh melalui dua alur pendekatan yaitu pendekatan monolitik dan pendekatan integratif (Dirjen Dikti, 1988: 139) yaitu:

- a. Pendekatan monolitik merupakan pendekatan yang didasarkan pada pemikiran bahwa setiap mata pelajaran merupakan sebuah komponen yang berdiri sendiri dan mempunyai tujuan tertentu dalam suatu kesatuan sistem.

Pendekatan monolitik dapat ditempuh melalui dua cara.

- 1) Membangun disiplin yang dinamakan Pendidikan Lingkungan Hidup, yang kedudukannya dalam kurikulum sama dengan mata pelajaran lainnya.
 - 2) Membangun suatu paket Pendidikan Lingkungan Hidup yang merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- b. Pendekatan Integratif merupakan pendekatan yang didasarkan pemaduan mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup dengan mata pelajaran lain.

Dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, menurut Hamzah (2013:53) terdapat beberapa pokok bahasan yang diberikan dalam pendidikan lingkungan, yakni:

- 1) Ekosistem

Menjelaskan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, baik sumber daya ragawi maupun non ragawi yang secara bersama-sama serta saling terkait dalam membangun dan menciptakan kondisi lingkungan yang layak tinggal untuk manusia termasuk yang berkenaan dengan lingkungan sosial dan lingkungan binaan.

2) Sumber Daya Lingkungan

Menjelaskan berbagai macam sumber daya lingkungan dengan masing-masing ciri dan sifat, berkaitan dengan kegiatan makhluk hidup dalam mengakses sumber daya tersebut dengan derajat dan tingkahnya yang dapat mempengaruhi kondisi sumber daya tersebut serta menjelaskan cara memanfaatkan sumber daya secara bijak sehingga dapat terjaga kelangsungannya dan mampu mewujudkan kondisi lingkungan yang seimbang.

3) Daya dukung lingkungan

Memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasan daya dukung lingkungan serta dampak-dampak potensial yang terjadi akibat interaksi manusia dengan lingkungannya. Materi yang berkaitan dengan informasi mengenai sumber daya lingkungan nonragawi yang memiliki keterbatasan, baik ketersediaannya maupun yang berkenaan dengan daya lentingnya (kemampuan memperbaharui diri) perlu mendapatkan perhatian dalam materi pembelajaran.

4) Kepedulian

Materi yang diberikan berkaitan dengan kepedulian adalah menanamkan kesadaran dan membina sikap peduli terhadap lingkungan. Memberi pemahaman kepada peserta didik tentang warisan alam dan lingkungan sebagai suatu anugerah yang harus dijaga dan dihargai. Rasa memiliki terhadap lingkungan dapat dibangkitkan dan diinternalisasikan pada peserta didik.

5) Partisipasi

Materi pendidikan lingkungan yang diberikan mampu mendorong keinginan untuk ikut serta dalam memelihara dan melestarikan lingkungan yang sehat dan layak tinggal. Hal ini mencakup upaya mempersiapkan manusia untuk peduli, bekerja, dan bertindak untuk kelestarian lingkungan.

6) Estetika

Merupakan salah satu kebutuhan nonfisik manusia, sehingga materi lingkungan yang diberikan hendaknya dapat membangkitkan daya inspirasi untuk berkreasi guna menciptakan suatu lingkungan yang asri dan menyenangkan di samping sikap menghargai keindahan lingkungan yang telah disediakan oleh alam.

7) Kearifan local

Setiap daerah, wilayah, dan suku bangsa, memiliki karakteristik tersendiri serta cara tersendiri dalam menyikapi dan memperlakukan lingkungannya. Pengetahuan tentang kearifan lokal dari suatu masyarakat dalam memandang dan memperlakukan alam yang mengandung konsep-konsep universal harus dikenalkan serta diinternalisasikan pada peserta didik.

8) Etika Lingkungan

Memberikan pengajaran yang berkaitan dengan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungannya yang terwujud pada perilakunya dalam memperlakukan lingkungan dengan segenap unsur atau pengada yang ada di dalamnya.

9) Pengambilan Keputusan terhadap Isu Lingkungan

Pengetahuan tentang lingkungan dan permasalahannya merupakan bagian dari materi yang harus diajarkan. Melalui pengetahuan ini peserta didik diarahkan kepada kemampuan mengambil keputusan yang efektif tentang isu lingkungan yang memerlukan pertimbangan ekologis dan faktor-faktor sosial.

10) Kebencanaan

Masalah kebencanaan, khususnya bencana alam sangat penting diketahui oleh masyarakat Indonesia sebagai negara yang rawan bencana alam. Pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang bencana alam tersebut akan mampu mengurangi tindakan yang menjadi penyebab terjadinya bencana untuk bencana alam yang disebabkan oleh perilaku manusia. Sedangkan untuk bencana alam yang bersifat katastrof dapat mengurangi kerugian harta benda dan korban yang terjadi akibat bencana alam tersebut.

Hamzah (2013: 57) mengatakan kurikulum pendidikan lingkungan hidup setidaknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur empirik, yakni memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara langsung. Peserta didik dapat mengamati, memahami, menganalisis, dan menginterpretasi segenap fenomena dan sumber daya yang ia temukan di lingkungan.

- 2) Unsur kepedulian, yaitu dengan memberikan sentuhan tertentu yang mampu membangkitkan kesadaran bahwa lingkungan merupakan suatu hal yang kompleks. Peserta didik diarahkan untuk memahami bahwa segenap unsur yang ada di lingkungan itu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Keberadaan unsur yang satu akan berpengaruh terhadap unsur yang lainnya.
- 3) Unsur estetik, yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang keberadaan sumber daya amenities (kenikmatan). Hal ini seperti sumber-sumber daya yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan nonfisik yang dibutuhkan manusia, seperti pemandangan alam, tatanan lingkungan yang asri, menyejukkan rasa serta memberikan ketenteraman, dan lain-lain sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap sumber daya lingkungan tersebut.
- 4) Unsur sosial, materi yang diberikan mencakup kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengamati kehidupan sosial suatu masyarakat; bagaimana suatu masyarakat berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya; bagaimana budaya-budaya lokal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan tumbuh dan terpelihara di masyarakat serta dampak yang dihasilkannya.

Soerjani (2009: 58) berpendapat pendidikan lingkungan harus mampu mengintegrasikan pengembangan kearifan untuk bersikap dan berperilaku dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh lingkungan. Sikap dan tingkah laku makhluk hidup dapat dijabarkan secara sederhana tetapi

jelas dalam program program adiwiyata yang dicanangkan oleh Menteri Lingkungan Hidup untuk lembaga pendidikan.

Adiwiyata merupakan program sekolah yang memiliki tujuan untuk memberikan pembelajaran dan penyadaran warga sekolah agar di kemudian hari warga sekolah dapat bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan utama diarahkan pada terwujudnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan untuk sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Program dan kegiatan sekolah adiwiyata dikembangkan berdasarkan norma-norma dasar dalam kehidupan yang meliputi: kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam (Utomo dkk, 2009: 54).

Beberapa keuntungan yang diperoleh oleh sekolah dalam mengikuti program adiwiyata, yaitu:

- 1) Mendukung pencapaian standar/kompetensi dasar dan standar kompetensi lulusan (SKL) pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan energi.
- 3) Menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif.
- 4) Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian dan pelestarian fungsi lingkungan sekolah.

B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Tentang Implementasi Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar.



Sumber: Modifikasi penelitian, 2019.

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas serta dihubungkan dengan landasan teori yang ada maka penulis

mengemukakan hipotesis sebagai berikut: “Diduga implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan baik”.

D. Konsep Operasional

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Program adalah rencana suatu pelaksanaan yang akan dilakukan sebagai dasar dalam operasional suatu lembaga atau organisasi.
2. Program Adiwiyata adalah kegiatan yang dilaksanakan guna mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Kebijakan adalah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

4. Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan.
5. Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
6. Sumber daya dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
7. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
8. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di

Kabupaten Kampar. Adapun penjabaran variabel variabel pelayanan publik tersebut kedalam operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1: Konsep Operasional dan Operasional Variabel Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah atau persoalan (Winanrno,2014: 21)	Pelaksanaan program Adiwiyata Tingkat SMP di Kabupaten Kampar	1. Komunikasi	a. Proses penyampaian informasi b. Kejelasan informasi c. Konsistensi informasi	Terlaksana Kurang terlaksana Tidak terlaksana
		2. Sumber Daya	a. Kuantitas pelaksana b. Kualitas pelaksana	Terlaksana Kurang terlaksana Tidak terlaksana
		3. Disposisi	a. Antusias pelaksana b. Dukungan pelaksana	Terlaksana Kurang terlaksana Tidak terlaksana
		4. Struktur Birokrasi	a. SOP b. Pragmentasi	Terlaksana Kurang terlaksana Tidak terlaksana

Sumber: Olahan Peneliti, 2019.

F. Ukuran Variabel

Ukuran variabel implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksana : apabila seluruhnya dari sub indikator terlaksana dengan baik.

- b. Kurang terlaksana : apabila 1 dari sub indikator terlaksana
- c. Tidak terlaksana : apabila dari semua sub indikator tidak terlaksana sama sekali.

G. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar, diukur melalui beberapa indikator. Selanjutnya indikator ini akan dijabarkan dalam beberapa sub indikator. Katagori penilaian terhadap pengertian seluruh indikator variabel tentang implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dibagi dalam tiga kelompok kategori yaitu: baik, cukup baik, dan tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini:

- a. Implementasi kebijakan pelaksanaan program adiwiyata tingkat SMP di Kabupaten Kampar dilihat dari komunikasi, pengukurannya adalah :

Terlaksana : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel > 67%.

Kurang terlaksana: Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel 34 % -66%

Tidak terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

- b. Implementasi kebijakan pelaksanaan program adiwiyata tingkat SMP di Kabupaten Kampar dilihat dari sumberdaya, pengukurannya adalah :

Terlaksana : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel > 67%.

Kurang terlaksana: Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel 34 % -66%

Tidak terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

- c. Implementasi kebijakan pelaksanaan program adiwiyata tingkat SMP di Kabupaten Kampar dilihat dari disposisi, pengukurannya adalah:

Terlaksana : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel > 67%.

Kurang terlaksana: Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel 34 % -66%

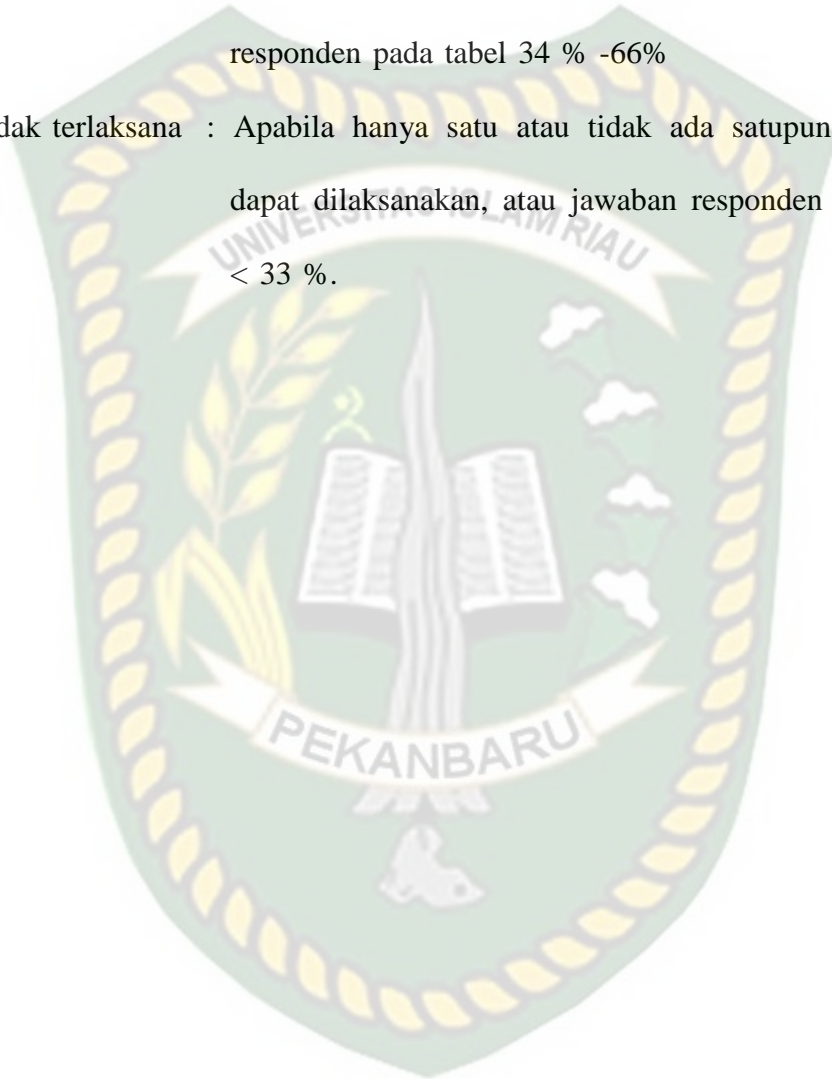
Tidak terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

- d. Implementasi kebijakan pelaksanaan program adiwiyata tingkat SMP di Kabupaten Kampar dilihat dari struktur birokrasi, pengukurannya adalah :

Terlaksana : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel $> 67\%$.

Kurang terlaksana: Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel $34\% - 66\%$

Tidak terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel $< 33\%$.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berbentuk analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan menyeluruh terhadap suatu konsep atau fenomena-fenomena sosial tertentu. Kemudian penelitian ini mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Menurut Arikunto (2006:12) “Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Selain data yang berupa angka, dalam penelitian kuantitatif juga ada data berupa informasi kualitatif”.

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian survey. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala, ciri khas penelitian ini adalah data penelitian dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner (Iskandar, 2008:66).

B. Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009:41), penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variable-variabel yang diteliti. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena adanya indikasi bahwa sekolah tingkat SMP di Kabupaten Kampar

belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, sehingga warga sekolah kurang mengenal maksud dan tujuan program Adiwiyata.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan elemen-elemen yang menjadi objek penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. III.1: Daftar Popoulasi dan Sampel Penelitian.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kabid. Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar	1	1	100 %
2	Tim Adiwiyata SMPN 1 Kampar Kiri Tengah	4	4	100 %
3	Tim Adiwiyata SMPN 1 Bangkinang	4	4	100 %
4	Tim Adiwiyata SMPN 1 Kuok	4	4	100 %
Jumlah		13	13	100 %

Sumber: Data olahan, 2019.

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Iskandar (2005:69) sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau sebagian kecil yang diamati. Teknik penarikan sampel adalah dengan menggunakan teknik sensus, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Sampel

terpilih kemudian ditetapkan menjadi responden dalam penelitian ini yang berjumlah 14 orang.

G. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Iskandar (2008:252) data primer data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner dan wawancara. Adapun data tersebut adalah identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan serta pendidikan terakhir. Selain itu diperoleh juga data tentang implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008:253), data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersipat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data gambaran

umum Kabupaten Kampar serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Riduwan (2009:29) wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait seperti Kabid. Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar dan tim adiwiyata sekolah, dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan program Adiwiyata.

b. Kuisisioner

Menurut Usman (2009:57) kuisisioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini lembaran pertanyaan disebarakan kepada Tim adiwiyata sekolah yang terpilih menjadi responden untuk diisi berdasarkan alternatif jawaban yang ada. Alasan diberikan pada Tim Adiwiyata Sekolah karena jumlahnya yang besar dan tidak bisa dilakukan wawancara secara langsung secara satu persatu.

c. Observasi

Menurut Usman (2009:52) teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder tentang implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar.

d. Dokumentasi

Menurut Riduwan (2009:31), dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan mendapatkan konsep teori penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Menurut Arikunto (2006:235) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul. Analisa data kuantitatif adalah menggunakan data statistik. Dalam penelitian ini setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mengelompokkan sesuai dengan jenis data, kemudian akan diolah dan dianalisis secara *deskriptif*, yaitu: menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan antara kondisi implementasi kebijakan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar yang seharusnya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

H. Jadwal Penelitian

Untuk dapat melihat jadwal penelitian tentang implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.

No	Keterangan	Bulan dan Minggu Tahun 2019															
		Mar-Mei				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan UP	■	■	■	■												
2	Seminar UP					■											
3	Perbaikan UP					■	■	■	■								
4	Perbaikan Kuisioner									■	■	■	■				
5	Pengurusan Rekomendasi Penelitian											■					
6	Penelitian Lapangan											■	■				
7	Penelitian dan Analisis Data													■	■		
8	Penyusunan Laporan Penelitian														■		
9	Konsultasi Penelitian														■		
10	Ujian Skripsi															■	
11	Repisi dan Pengesahan Skripsi															■	■
12	Penggandaan serta Penyerahan Skripsi																■

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor:10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau.
- b. Pekanbaru selain menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
- e. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

2. Kondisi Geografi Kabupaten Kampar

a. Batas dan luas wilayah

Sebagai salah satu dari dua belas kabupaten/kota di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.128.928 Ha. Secara astronomis terletak diantara terleta antara $01^{\circ}00'40''$ Lintang Utara sampai $00^{\circ}27'00''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}28'30''$ – $101^{\circ}14'30''$ Bujur Timur. Adapun batas- batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu :

- 1) Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman

rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.

- 2) Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya \pm 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 -12 m yang melintasi Kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

b. Topografi

Secara topografis, Kabupaten Kampar merupakan daerah bergelombang dengan dataran rendah, rawa-rawa, dataran tinggi atau perbukitan dan sedikit bergunung dengan ketinggian rata-rata sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kampar untuk menjadi daerah pertanian. Disamping itu, kondisi jenis tanah yang ada di Kabupaten Kampar terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu tanah jenis organosol dan glei humus dengan bahan aluvial, jenis tanah podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan endapan dan beku, dan jenis tanah podsolik merah kuning latosol, litosol dengan bahan induk batuan beku. Tekstur tanah yang ada di Kabupaten Kampar pada umumnya liat berpasir dan lempung pasir.

Kabupaten Kampar dengan luas lahan sebesar 1.052.458 hektar, penggunaan tanahnya dapat dibedakan menjadi tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tegal kebun, ladang huma, padang rumput, tambak, kolam,

lahan sementara tidak diusahakan, hutan, perkebunan, sawah dan lainnya. Dari berbagai jenis tanah yang tersebar, seluas 6.845 digunakan untuk lahan sawah, dan 1.045.913 hektar merupakan lahan kering. Pada umumnya sebagian besar lahan kering dimanfaatkan untuk usaha perkebunan seluas 311.775 hektar.

c. Klimatologis

Kabupaten Kampar beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim yakni musim hujan dan kemarau. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis. Temperatur minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21⁰C. Temperatur maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35⁰C. Jumlah hari hujan dalam Tahun 2016, yang terbanyak adalah disekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri. Pada Tahun 2016, jumlah hari hujan setahun rata-rata 256 hari. Kondisi klimatologis demikian amat cocok dalam pengembangan berbagai komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan beberapa jenis komoditi perkebunan. Dalam 5 (lima) Tahun belakangan ini belum menggambarkan terjadinya kondisi ekstrim pada musim hujan dan musim kemarau.

d. Geologi dan Kerawanan Bencana

Kabupaten Kampar sebagaimana sebagian wilayah Indonesia terletak ditengah-tengah Pulau Sumatra. Dimana keadan alam sangat dipengaruhi dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kondisi geologis tersebut menyebabkan Kabupaten Kampar kaya akan hasil tanah dan pertanian sekaligus rawan terhadap bencana alam.

Sedangkan dari segi kerawanan bencana, Kabupaten Kampar memiliki

ancaman bencana longsor yang cukup tinggi dengan jumlah lokasi sebanyak lima titik. Titik rawan longsor ini tersebar di Desa Pulau Gadang, Desa Merangin, dan sepanjang jalan perbatasan Sumbar-Riau. kondisi tanah tebing yang terus tergerus air, disepanjang jalan sangat memungkinkan terjadinya longsor. Bencana alam lainnya yang perlu diwaspadai adalah banjir dengan seringnya meluap air Sungai Kampar, Sungai Subayang dan Sungai Tapung di Kabupaten Kampar yang mengakibatkan terendamnya sepertiga dari jumlah desa di Kampar, tepatnya 82 desa dari 250 desa dan kelurahan di Kabupaten Kampar.

Kondisi geologis seperti itu memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Kampar dalam pembangunan daerah. Pengelolaan potensi sumberdaya geologis yang berwawasan lingkungan sekaligus mitigasi bencana alam dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi jawaban untuk dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya geologis yang dimiliki Kabupaten Kampar.

e. Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Kampar memiliki 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang besar dan beberapa sungai kecil yaitu Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 m yang melintasi

Kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Tingginya sedimentasi, berkurangnya jumlah dan debit mata air, serta semakin meluasnya wilayah bukaan di bagian hulu DAS menunjukkan kondisi DAS sebagian besar mengalami degradasi sehingga upaya rehabilitasi mendesak dilakukan.

Tabel IV.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kampar

No	Nama DAS	Panjang
1	Das Kampar - Sub das Kamar Kanan - Sub das Kampar Kiri	413,5 Km
2	Das Siak bagian Hulu - Sub das Tapung	90 Km
Total		503,5 km

Sumber: RTRW Kampar

3. Administratif

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU N0 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Sebagai Kabupaten, Kampar dikepalai oleh seorang bupati dengan satu orang wakil bupati. Pada tahun 2014 Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan.

Tabel IV.2 Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	
		Administrasi	Terbangun
		Ha	Ha
Kampar Kiri	20	118.128	2585,5
Kampar Kiri Hulu	24	850.00	1082,4
Kampar Kiri Hilir	8	44.367	376,92
Kampar Kiri Tengah	11	50.681	2653,75
Gunung Sahilan	9	48.964	1052,73
XIII Koto Kampar	13	91.900	591
Koto Kampar Hulu	6	68.333	754
Kuok	9	41.888	7839,5
Salo	6	20.783	2212
Tapung	25	73.921	74,79
Tapung Hulu	14	46.620	3264
Tapung Hilir	16	87.325	2547
Bangkinang Kota	4	93.770	2480
Bangkinang	9	13.088	1878
Kampar	18	14.366	4611,29
Kampar Timur	9	11.805	1056,4
Rumbio Jaya	7	76.920	798,65
Kampar Utara	8	19.462	1181,25
Tambang	17	53.298	2184,15
Siak Hulu	12	98.707	10403
Perhentian Raja	5	15.997	2139
Jumlah		1.090.323	51.765,33

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2019

4. Jumlah Penduduk

Informasi jumlah penduduk amat penting bagi pembangunan daerah mengingat penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan itu sendiri. Jumlah penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2015

berjumlah 793.005 jiwa yang terdiri atas 407.228 penduduk laki-laki dan 385.777 jiwa penduduk perempuan.

Tabel IV.3 Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Kampar Kiri	29.987
2	Kampar Kiri Hulu	11.876
3	Kampar Kiri Hilir	11.462
4	Kampar Kiri Tengah	26.953
5	Gunung Sahilan	19.736
6	XIII Koto Kampar	24.144
7	Koto Kampar Hulu	18.939
8	Kuok	25.186
9	Salo	25.954
10	Tapung	95.476
11	Tapung Hulu	81.936
12	Tapung Hilir	60.106
13	Bangkinang Kota	39.773
14	Bangkinang	33.043
15	Kampar	50.555
16	Kampar Timur	24.528
17	Rumbio Jaya	17.292
18	Kampar Utara	17.242
19	Tambang	61.027
20	Siak Hulu	100.253
21	Perhentian Raja	17.637
	Jumlah	793.005

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka 2019

5. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Guna meningkatkan kualitas pendidikan ini dibutuhkan sarana pendidikan dan penyediaan guru yang memadai.

Pada Kabupaten Kampar terdapat 451 SD Negeri, 73 SMP Negeri, 33 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri. Data jumlah dan fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Kampar tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.4 Jumlah Fasilitas Pendidikan yang Tersedia di Kabupaten Kampar

Nama Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pendidikan						
	Umum				Agama		
	SD	SLTP	SMA	SMK	MI	MTs	MA
Kampar Kiri	25	3	2	0	0	32	13
Kampar Kiri Hulu	29	8	1	0	0	0	0
Kampar Kiri Hilir	11	4	1	0	0	3	0
Kampar Kiri Tengah	18	2	1	0	3	11	3
Gunung Sahilan	10	3	1	1	0	3	3
XIII Koto Kampar	19	3	2	1	3	17	4
Koto Kampar Hulu	13	2	1	0	0	0	2
Kuok	20	3	2	0	0	13	13
Salo	14	2	1	0	0	16	4
Tapung	42	7	4	1	20	34	24
Tapung Hulu	40	4	1	0	3	19	0
Tapung Hilir	28	4	2	0	0	18	8
Bangkinang Kota	20	2	2	1	0	11	9
Bangkinang	22	3	1	0	0	31	22
Kampar	25	5	2	0	18	49	40
Kampar Timur	17	2	2	0	1	21	23
Rumbio Jaya	12	4	1	0	0	4	10
Kampar Utara	16	2	1	0	0	34	9
Tambang	35	5	2	0	16	27	9
Siak Hulu	25	3	2	0	0	14	3
Perhentian Raja	10	2	1	0	0	23	5
Jumlah	451	73	33	4	64	380	204

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka 2019

B. Gambaran Umum Program Adiwiyata

Tujuan program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah. Diharapkan dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut

bertanggungjawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan utama program Adiwiyata adalah mewujudkan kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Untuk mengembangkan program dan kegiatan dalam program Adiwiyata harus berdasarkan norma-norma dasar dan berkehidupan. Norma dasar program Adiwiyata meliputi kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program Adiwiyata yaitu partisipatif dan berkelanjutan. Partisipatif yang dimaksud yaitu komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah. Manajemen sekolah ini meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran masing-masing warga sekolah.

Sedangkan yang dimaksud dengan berkelanjutan yaitu seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif. Program Adiwiyata merupakan program yang dibuat untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Sekolah sebagai lembaga juga memiliki keuntungan apabila mengikuti program Adiwiyata, keuntungan tersebut yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan energi.

2. Mendukung percepatan pencapaian 8 standar Nasional Pendidikan (isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan biaya, dan penilaian) sebagaimana diatur dalam PP No.19 tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif .
4. Menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar.
5. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah.

1. Pelaksanaan Program Adiwiyata

Pelaksanaan program Adiwiyata terdiri dari tim Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan tim Sekolah. Unsur dan peran masing-masing tim seperti tercantum dibawah ini;

1. Tim Nasional

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut: Kementerian Lingkungan Hidup (Koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Agama, LSM Pendidikan Lingkungan, Perguruan Tinggi, Media serta Swasta. Tim tingkat Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup.

Peran dan tugas pokok dari tim nasional adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kebijakan, program, panduan, materi pembinaan dan instrumen observasi;
 - b. Melakukan Koordinasi dengan Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) dan Propinsi;
 - c. Melakukan Sosialisasi program dengan Provinsi;
 - d. Melakukan Bimbingan teknis kepada Tim Provinsi dalam rangka pembinaan sekolah;
 - e. Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional;
 - f. Melakukan Evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program
 - g. Adiwiyata kepada Menteri Lingkungan Hidup tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Tim Provinsi
- Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut: Badan Lingkungan Hidup Provinsi (Koordinator), Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, LSM Pendidikan Lingkungan, Media Massa, Perguruan Tinggi serta Swasta. Tim Propinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur. Peran dan tugas pokok dari tim nasional adalah sebagai berikut:
- a. Mengembangkan program Adiwiyata tingkat Provinsi;
 - b. Koordinasi dengan Kabupten/Kota;
 - c. Melakukan Sosialisasi program dengan Kabupten/Kota;
 - d. Bimbingan teknis kepada Kabupten/Kota dalam rangka pembinaan sekolah;

- e. Membuat Pilot projek 4 satuan pendidikan yang berbeda (SD, SMP, SMA, SMK) setiap Provinsi;
 - f. Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Provinsi;
 - g. Melakukan Evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program
 - h. Adiwiyata kepada Gubernur tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup
3. Tim Kabupaten/Kota
- Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Koordinator), Dinas Pendidikan, Kantor Agama, LSM Pendidikan Lingkungan, Media Massa, Perguruan Tinggi, Swasta sekolah Adiwiyata Mandiri. Tim Kabupaten ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota. Peran dan tugas pokok dari tim nasional adalah sebagai berikut:
- a. Mengembangkan/melaksanakan program Adiwiyata tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Sosialisasi program Adiwiyata kepada sekolah
 - c. Bimbingan teknis kepada sekolah
 - d. Membuat Pilot projek 4 satuan pendidikan yang berbeda (SD, SMP, SMA, SMK) setiap Kabupaten/Kota
 - e. Menetapkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten/Kota
 - f. Melakukan Evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program Adiwiyata kepada Bupati/Walikota kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi.

4. Tim Sekolah

Terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut: guru, siswa, dan komite sekolah. Tim sekolah ditetapkan melalui SK Kepala Sekolah Peran dan tugas pokok dari tim nasional adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji kondisi lingkungan hidup sekolah, kebijakan sekolah, kurikulum sekolah, kegiatan sekolah, dan sarana dan prasarana
- b. Membuat rencana kerja dan mengalokasikan anggaran sekolah berdasarkan hasil kajian tersebut diatas, dan disesuaikan dengan komponen, standar, dan implementasi adiwiyata
- c. Melaksanakan rencana kerja sekolah
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi
- e. Menyampaikan laporan kepada Kepala Sekolah tembusan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

2. Komponen dan Standar Adiwiyata

A. Kebijakan Sekolah Berwawasan Lingkungan

1. KTSP memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - a. Visi, misi, dan tujuan sekolah yang tertuang dalam KTSP memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - b. Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- c. Mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilengkapi dengan Ketuntasan minimal belajar
2. RKAS memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.

B. Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan

1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup.
 - a. Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran.
 - b. Mengembangkan isu lokal dan/atau isu global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup sesuai dengan jenjang pendidikan
 - c. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran lingkungan hidup.
 - d. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas

- e. Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran lingkungan hidup.
 - f. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup.
 - g. Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - a. Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - b. Menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang diperoleh untuk memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari
 - c. Mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup dengan berbagai cara dan media

C. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif

1. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah.
 - a. Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah.

- b. Memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidahkaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - d. Adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar.
2. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak antara lain : orang tua, alumni, komite sekolah, LSM, media, dunia usaha, konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dll
- a. Memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup.
 - b. Mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. Meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - d. Menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup.

- e. Memberikan dukungan kepada masyarakat, atau sekolah lain untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan

1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan hidup.
 - a. Menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah.
 - b. Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah.
2. Peningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan.
 - a. Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan.
 - b. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah.
 - c. Memanfaatkan listrik, air, dan alat tulis kantor secara efisien.
 - d. Meningkatkan kualitas layanan kantin sehat dan ramah lingkungan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang di peroleh dari hasil penelitian, kemudian dikemukakan analisis tentang pokok pembahasan mengenai implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar. Dari penyebaran kuesioner diperoleh data tentang identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Selain itu diperoleh juga data tentang implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat distribusi frekuensi di bawah ini:

A. Identitas Responden

Responden di sini adalah orang-orang yang telah dipilih menjadi sampel penelitian. Identitas responden sangat bermanfaat dalam penelitian, guna untuk mengetahui latar belakang responden. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian penulis mengemukakan identitas responden dari:

1. Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini penulis menemukan responden tidak hanya pada satu golongan yaitu yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini supaya ada keadilan terhadap responden untuk member tanggapan/informasi

kepada penulis lebih lengkap. Adapun jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekwensi	Persentase %
1	Laki-laki	8	66.66
2	Perempuan	4	33.33
Jumlah		12	100

Sumber: Data olahan 2019.

Dengan melihat data tabel diatas maka diketahui jenis kelamin responden mayoritas adalah laki-laki yaitu sebanyak 8 orang atau 66.66 % dan perempuan sebanyak 4 orang atau 33.33 %.

2. Umur Responden

Tingkat umur responden yang dijadikan penelitian itu berbeda-beda. Hal ini berpengaruh kepada tingkat pemahaman terhadap informasi yang penulis dapatkan. Adapun tingkatan umur responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. V.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur (Tahun)	Frekwensi	(%)
1	30 - 40	4	33.33
2	41 - 50	5	41.66
3	51 - 60	3	25.00
4	61 - 70	-	-
Jumlah		12	100 %

Sumber: Data olahan 2019.

Berdasarkan tabel diatas dari 12 responden yang di data dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah berumur 30-40 tahun yaitu 4 orang atau 33.33 %, kemudian diikuti responden yang berumur 41-50 tahun sebanyak 5

orang atau 41.66 %, kemudian diikuti responden yang berumur 51-60 tahun sebanyak 3 orang atau 25 % sedangkan responden yang berumur 61-70 tahun tidak ada atau 0%

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebahagian besar responden yang diteliti dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa atau matang dalam berpikir, sehingga dianggap mampu memberikan data-data dan informasi yang dibutuhkan.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden itu sangat mempengaruhi terhadap jawaban responden. Karena pada dasarnya pemahaman dan pengetahuan itu sangat penting, tingkat pendidikan responden itu berbeda-beda antara satu dengan lain. Jika ada yang sama tingkat pendidikannya pun tidak sama daya pemahaman dan pengetahuan. Adapun tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekwensi	(%)
1	SLTA	-	-
2	D3	1	8.33
3	S1	10	83.33
4	S2	1	8.33
Jumlah		12	100 %

Sumber: Data olahan 2019

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan S1 yakni 10 orang atau 83.33 %, kemudian D3 sebanyak 1 orang atau 8.33 %, S2 sebanyak 1 orang atau 8.33 % dan yang memiliki tingkat pendidikan SLTA tidak ada atau 0 %.

B. Implementasi Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar.

Program Adiwiyata merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kementerian Pendidikan yang pertama melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013. Adiwiyata dicanangkan untuk mendorong dan membentuk sekolah-sekolah di Indonesia agar dapat turut melaksanakan upaya pemerintah menuju pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Program Adiwiyata merupakan langkah nyata sebagai kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan untuk menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar, penulis menetapkan empat penilaian dengan indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

1. Komunikasi

Komunikasi digunakan sebagai upaya penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Para implementor harus secara intensif melakukan berbagai cara untuk mensosialisasikan tujuan dan manfaat dari pelaksanaan sebuah kebijakan (Winarno, 2014:211).

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah berupa adanya komunikasi yang berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada kelompok sasaran (*target group*). Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang cara atau upaya dalam proses penyampaian informasi, selain pentingnya informasi sebagai pendukung dalam komunikasi, juga diperlukan proses transmisi atau penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi atas informasi.

Penulis menetapkan tiga penilaian dari komunikasi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar, yaitu:

1. Proses penyampaian informasi
2. Kejelasan informasi
3. Konsistensi informasi

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.4 Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Komunikasi Pelaksanaan Program Adiwiyata.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Proses penyampaian informasi	6 (50%)	4 (33.33%)	2 (16.66 %)	12 (100 %)
2	Kejelasan informasi	5 (41.66%)	5 (41.66%)	2 (16.66%)	12 (100 %)
3	Konsistensi informasi	7 (58.33%)	4 (33.33%)	1 (8.33%)	12 (100 %)
Jumlah		18	13	5	36
Rata-rata		6	4	2	12
Persentase		50 %	33.33 %	16.66 %	100 %

Sumber: Data Olahan Penelitian 2019.

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator komunikasi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar yang dinilai pada item pertama yaitu proses penyampaian informasi program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah

Pertama di Kabupaten Kampar sebanyak 6 orang atau 50 % mengatakan terlaksana, sebanyak 4 orang atau 33.33 % mengatakan kurang terlaksana dan sebanyak 2 orang atau 16.66 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap proses penyampaian informasi program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dalam kategori kurang terlaksana.

Pada item kedua yaitu kejelasan informasi program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar sebanyak 5 orang atau 41.66 % mengatakan terlaksana, sebanyak 5 orang atau 41.66 % mengatakan kurang terlaksana dan sebanyak 2 orang atau 16.66 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap kejelasan informasi program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dalam kategori kurang terlaksana.

Pada item ketiga yaitu konsistensi informasi program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar sebanyak 7 orang atau 58.33 % mengatakan terlaksana, sebanyak 4 orang atau 33.33 % mengatakan kurang terlaksana dan sebanyak 1 orang atau 8.33 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap konsistensi informasi program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dalam kategori kurang terlaksana.

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan jawaban responden, dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang komunikasi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah

Pertama di Kabupaten Kampar sebanyak 6 orang atau 50 % mengatakan terlaksana, sebanyak 4 orang atau 33.33 % mengatakan kurang terlaksana dan sebanyak 2 orang atau 16.66 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap komunikasi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dalam kategori kurang terlaksana.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kabid. Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar mengenai proses penyampaian informasi program Adiwiyata di Kabupaten Kampar, diperoleh informasi bahwa:

Waktu awal mengikuti program Adiwiyata sering dilakukan sosialisasi tentang Adiwiyata kepada sekolah-sekolah untuk guru, karyawan, siswa selalu diingatkan dan diberikan pengarahan dan pemahaman mengenai program Adiwiyata ini (hasil wawancara tanggal 23 Agustus 2019)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Kampar Kiri Tengah mengenai proses penyampaian informasi program Adiwiyata, diperoleh informasi bahwa:

Informasi program ini cukup jelas. Semua warga sekolah guru maupun siswa di SMPN 1 Kampar Kiri Tengah ini sudah mengetahui tentang kebijakan ini, kami selaku Kepala Sekolah bertugas melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah (hasil wawancara tanggal 26 Agustus 2019)

Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penyampaian mengenai kebijakan program Adiwiyata di Kabupaten Kampar telah disosialisasikan kepada sekolah-sekolah agar setiap warga sekolah mengenal adanya program Adiwiyata di Kabupaten Kampar serta mengetahui maksud dan tujuannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Bangkinang mengenai proses penyampaian informasi program Adiwiyata kepada siswa diperoleh informasi bahwa:

Kami selalu melakukan sosialisasi atau penyampaian informasi tentang program adiwiyata ini kepada siswa, semisal waktu upacara. Tujuannya sebenarnya untuk menciptakan siswa mempunyai rasa cinta terhadap alam, dan siswa dapat melestarikan alam, menjaga bumi (hasil wawancara tanggal 27 Agustus 2019).

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa orang siswa SMPN 1 Bangkinang mengenai program Adiwiyata diperoleh informasi bahwa:

Iya, kami tau tentang kebijakan ini, sering sekali kepala sekolah dan guru melakukan sosialisasi mengenai program Adiwiyata ini (hasil wawancara tanggal 27 Agustus 2019).

Berdasarkan wawancara penulis dengan guru SMPN 1 Bangkinang mengenai program Adiwiyata diperoleh informasi bahwa:

Pelaksanaan program adiwiyata ini kami lakukan dalam bentuk pengembangan kurikulum berbasis lingkungan yaitu pembelajaran PLH diintegrasikan pada mata pelajaran, jadi semua mapel harus memuat PLH. Jadi kurikulum yang terintegrasi tidak berubah, tetap. Cuma dilaksanakan ada poin-poinnya itu ditambahkan materi lingkungannya. Seperti halnya membuat tema, tetap membuat tema tapi nanti oleh si guru ditambahkan temanya tentang lingkungan hidup (hasil wawancara tanggal 27 Agustus 2019).

Dari beberapa pernyataan yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa proses penyampaian informasi mengenai program adiwiyata ini telah tersampaikan dengan baik kepada siswa maupun guru dan mampu dipahami oleh setiap guru dan siswa. Hal ini memudahkan bagi sekolah dalam menjalankan kebijakan program Adiwiyata.

Berdasarkan hasil observasi penulis di beberapa SMP di Kabupaten Kampar diketahui bahwa selama ini, informasi mengenai pelaksanaan Program

Adiwiyata memang sudah sangat jelas dan dipahami oleh seluruh siswa dan guru, tapi konsistensi pelaksanaan program adiwiyata ini masih kurang, karena tidak adanya konsistensi akan pemberian sanksi yang jelas dilakukan bagi siswa dan guru yang tidak melaksanakan program ini.

Konsistensi atas informasi yang disampaikan diperlukan guna menghindari kebingungan diantar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan pelaksanaan program adiwiyata ini sangat dituntut adanya konsistensi informasi namun jika terjadi perubahan, secara otomatis informasi juga ikut berubah.

Berdasarkan uraian baik dari data kuisioner, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka penulis menarik kesimpulan bahwa komunikasi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar yang dinilai dari beberapa indikator yaitu: proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, konsistensi informasi sebagian item yang dinilai dapat digolongkan kedalam kategori kurang terlaksana.

2. Sumber Daya

Sumberdaya adalah faktor penting untuk efektifitas implementasi kebijakan. Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia yang meliputi kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Kekurangan sumberdaya dalam implementasi kebijakan akan mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan efektif meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. Tanpa sumber daya, kebijakan hanyalah sebuah kertas dokumen.

Penulis menetapkan dua penilaian dari sumber daya pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar, yaitu:

1. Kuantitas pelaksana
2. Kualitas pelaksana

Untuk mengetahui bagaimana sumber daya pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.5 Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Sumber Daya Pelaksanaan Program Adiwiyata.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
1	Kuantitas pelaksana	3 (25 %)	8 (66.66%)	1 (8.33 %)	12 (100 %)
2	Kualitas pelaksana	5 (41.66%)	4 (33.33%)	3 (25%)	12 (100 %)
Jumlah		8	12	4	24
Rata-rata		4	6	2	12
Persentase		33.33 %	50 %	16.66 %	100 %

Sumber: Data Olahan Penelitian 2019.

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator sumber daya pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar yang dinilai pada item pertama yaitu kuantitas pelaksana program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar sebanyak 3 orang atau 25 % mengatakan terlaksana, sebanyak 8 orang atau 66.66 % mengatakan kurang terlaksana dan sebanyak 1 orang atau 8.33 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan

sementara terhadap kuantitas pelaksana program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dalam kategori kurang terlaksana.

Pada item kedua yaitu kualitas pelaksana program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar sebanyak 5 orang atau 41.66 % mengatakan terlaksana, sebanyak 4 orang atau 33.33 % mengatakan kurang terlaksana dan sebanyak 3 orang atau 25 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap kualitas pelaksana program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dalam kategori kurang terlaksana.

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan jawaban responden, dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang sumber daya pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar sebanyak 4 orang atau 33.33 % mengatakan terlaksana, sebanyak 6 orang atau 50 % mengatakan kurang terlaksana dan sebanyak 2 orang atau 16.66 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap sumber daya pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dalam kategori kurang terlaksana.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kabid. Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar mengenai sumber daya pelaksanaan program Adiwiyata di Kabupaten Kampar, diperoleh informasi bahwa:

Sumber daya manusia pengelola program adiwiyata terdiri dari tim penilai, tim pembina dan tim teknis yang terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota, yang masing-masing memiliki tugas dan

memiliki peran penting dalam pelaksanaan program adiwiyata di Kabupaten Kampar (hasil wawancara tanggal 23 Agustus 2019)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Kuok mengenai sumber daya pelaksanaan program Adiwiyata, diperoleh informasi bahwa:

Kalau untuk di SMPN 1 Kuok, kami membentuk tim pengelola khusus itu namanya Tim Adiwiyata, tim itu terdapat penanggung jawab yaitu kepala sekolah, ketua tim, dan koordinator semuanya berperan penting dan harus terlibat (hasil wawancara tanggal 27 Agustus 2019)

Dari pernyataan dapat disimpulkan bahwa di SMPN 1 Kuok tim khusus dalam pengelolaan lingkungan adalah Tim Adiwiyata yang terdiri dari penanggung jawab, komite sekolah, koordinator, dan anggota-anggota memiliki tugas masing-masing dan memiliki peran penting dalam program adiwiyata.

Berdasarkan wawancara penulis dengan guru SMPN 1 Kuok mengenai sumber daya pelaksanaan program Adiwiyata, diperoleh informasi bahwa:

Sumber daya pelaksanaan program Adiwiyata di SMPN Kuok ini sudah memadai (hasil wawancara tanggal 27 Agustus 2019)

Selain jumlah pelaksana yang memadai juga diperlukan adanya pelaksana yang kompeten dalam menjalankan program tersebut, karena apabila jumlah pelaksana telah mencukupi, namun tanpa diimbangi dengan kemampuan atau keahlian dalam menjalankan program, maka dalam proses pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil merupakan hal yang sangat penting agar pelaksanaan program atau kebijakan lebih efisien dan efektif, dimana kadangkala pelaksanaan suatu kegiatan terhambat selain karena jumlah pelaksana yang tidak memadai dan juga pada kurangnya kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaksana.

Berdasarkan hasil observasi penulis di beberapa SMP di Kabupaten Kampar diketahui bahwa sumber daya pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar secara kuantitas sudah memadai karena seluruh warga sekolah ikut terlibat, namun secara kualitas masih kurang, terutama guru dalam mengimplementasikan program adiwiyata ini ke dalam mata pelajaran, disebabkan jarang sekali mengikuti pelatihan.

Berdasarkan uraian baik dari data kuisisioner, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka penulis menarik kesimpulan bahwa sumber daya pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar yang dinilai dari beberapa indikator yaitu: kuantitas pelaksana, kualitas pelaksana sebagian item yang dinilai dapat digolongkan kedalam kategori kurang terlaksana, karena dari segi kualitas masih kurang memadai.

3. Disposisi

Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan dukungan para pelaksana terhadap program atau kebijakan. Sikap dan dukungan sangat penting dalam proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap apa yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian tujuan. Bila para pelaksana atau implementor kebijakan terpecah belah dalam hal sikap dan dukungan tersebut maka apa yang akan dicapai dari suatu kebijakan tidak akan tercapai secara efektif dan efisien, karena akan menghadapi banyak rintangan dan kendala dari aparat pelaksana kebijakan itu sendiri, dimana pelaksanaan program atau kebijakan kadangkala bermasalah

apabila pelaksana yang terkait didalamnya tidak dapat menjalankan program atau kebijakan dengan baik. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia akan melaksanakan program atau kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedangkan apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan juga tidak akan efektif dan efisien.

Pentingnya kesamaan pandangan terhadap suatu program yang sedang dilaksanakan akan terlihat dari kesatuan arah dan gerak dari para pelaksana kebijakan. Dengan adanya kesamaan gerak dalam pelaksanaan kebijakan, maka diharapkan tujuan dari sebuah kebijakan sebagai sasaran yang hendak dicapai bukanlah hanya semata-mata sebuah cita-cita melainkan merupakan sebuah kenyataan.

Disposisi atau sikap daa pihak dalam melaksanakan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar yakni berkaitan dengan bagaimana antusias, respon, dan dukungan yang diberikan oleh para pihak terhadap program adiwiyata. Hal ini sangat mempengaruhi keterlaksanaan program, apabila tidak ada antusias, respon, dan dukungan maka program ini tidak akan berhasil dan berjalan efektif.

Penulis menetapkan dua penilaian dari disposisi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar, yaitu:

1. Antusias pelaksana
2. Dukungan pelaksana

Untuk mengetahui bagaimana disposisi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.6 Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Disposisi Pelaksanaan Program Adiwiyata.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Antusias pelaksana	8 (66.66 %)	3 (25 %)	1 (8.33 %)	12 (100 %)
2	Dukungan pelaksana	6 (50 %)	4 (33.33%)	2 (16.66%)	12 (100 %)
Jumlah		14	7	3	24
Rata-rata		7	4	1	12
Persentase		58.33 %	33.33 %	8.33 %	100 %

Sumber: Data Olahan Penelitian 2019.

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator disposisi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar yang dinilai pada item pertama yaitu antusias pelaksana program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar sebanyak 8 orang atau 66.66 % mengatakan terlaksana, sebanyak 3 orang atau 25 % mengatakan kurang terlaksana dan sebanyak 1 orang atau 8.33 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap dukungan pelaksana program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dalam kategori kurang terlaksana.

Pada item kedua yaitu dukungan pelaksana program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar sebanyak 6 orang atau 50 % mengatakan terlaksana, sebanyak 4 orang atau 33.33 % mengatakan kurang

terlaksana dan sebanyak 2 orang atau 16.66 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap dukungan pelaksana program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dalam kategori kurang terlaksana.

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan jawaban responden, dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang disposisi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar sebanyak 7 orang atau 58.33 % mengatakan terlaksana, sebanyak 4 orang atau 33.33 % mengatakan kurang terlaksana dan sebanyak 1 orang atau 8.33 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap disposisi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dalam kategori kurang terlaksana.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kabid. Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar mengenai dukungan terhadap program Adiwiyata di Kabupaten Kampar, diperoleh informasi bahwa:

Saya sangat mendukung, dilihat dari arti Adi dan Wiyata suatu tempat pembelajaran yang nyaman serta kaitannya dengan mengubah perilaku siswa dapat peduli dengan lingkungan (hasil wawancara tanggal 23 Agustus 2019)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Kampar Kiri Tengah mengenai dukungan terhadap pelaksanaan program Adiwiyata, diperoleh informasi bahwa:

Saya sangat mendukung sekali, pendidikan lingkungan hidup itu kan luas aspeknya bisa nanti ke Biologi. Di biologi lebih ke menjaga

lingkungan atau merawat lingkungan (hasil wawancara tanggal 26 Agustus 2019)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Bangkinang mengenai dukungan terhadap pelaksanaan program Adiwiyata kepada siswa diperoleh informasi bahwa:

Kalau saya sangat mendukung dari pelaksanaan program Adiwiyata di SMPN 1 Bangkinang ini, selama saya bisa melaksanakan tugas dengan baik (hasil wawancara tanggal 27 Agustus 2019).

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa orang siswa SMPN 1 Bangkinang mengenai dukungan terhadap program Adiwiyata diperoleh informasi bahwa:

Kami mendukung 100% pelaksanaan program Adiwiyata di sekolah kami, karena dilihat dari manfaat sekolahnya jadi bagus dan semua warga sekolah dilibatkan dalam program ini (hasil wawancara tanggal 27 Agustus 2019).

Berdasarkan wawancara penulis dengan guru SMPN 1 Bangkinang mengenai dukungan terhadap program Adiwiyata diperoleh informasi bahwa:

Kami kami sangat mendukung, karena tujuan dari pprogram ini sangat baik, dan manfaatnya juga untuk kita semua (hasil wawancara tanggal 27 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil observasi penulis di beberapa SMP di Kabupaten Kampar diketahui bahwa selama ini, kepala sekolah, guru dan siswa Pekanbaru sangat mendukung dalam pelaksanaan program Adiwiyata.

Berdasarkan uraian baik dari data kuisisioner, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka penulis menarik kesimpulan bahwa disposisi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar yang dinilai dari beberapa indikator yaitu: antusias

pelaksana, dukungan pelaksana sebagian item yang dinilai dapat digolongkan kedalam kategori terlaksana.

4. Struktur Birokrasi

Indikator keempat yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan mengabaikan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Penulis menetapkan dua penilaian dari struktur birokrasi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar, yaitu:

1. SOP
2. Pragmentasi

Untuk mengetahui bagaimana struktur birokrasi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.7 Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Struktur Birokrasi Pelaksanaan Program Adiwiyata.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	SOP	6 (50 %)	3 (25 %)	3 (25 %)	12 (100 %)
2	Pragmentasi	4 (33.33 %)	6 (50%)	2 (16.66%)	12 (100 %)
Jumlah		10	9	5	24
Rata-rata		5	5	2	12
Persentase		41.66 %	41.66 %	16.66 %	100 %

Sumber: Data Olahan Penelitian 2019.

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator sturktur birokrasi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar yang dinilai pada item pertama yaitu standar operasional prosedur program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar sebanyak 6 orang atau 50 % mengatakan terlaksana, sebanyak 3 orang atau 25 % mengatakan kurang terlaksana dan sebanyak 3 orang atau 25 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap standar operasional prosedur program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dalam kategori kurang terlaksana.

Pada item kedua yaitu koordinasi dan kerjasama para pihak yang terkait dalam program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar sebanyak 4 orang atau 33.33 % mengatakan terlaksana, sebanyak 6 orang atau 50 % mengatakan kurang terlaksana dan sebanyak 2 orang atau 16.66 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara

terhadap koordinasi dan kerjasama para pihak yang terkait dalam program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dalam kategori kurang terlaksana.

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan jawaban responden, dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang struktur birokrasi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar sebanyak 5 orang atau 41.66 % mengatakan terlaksana, sebanyak 5 orang atau 41.66 % mengatakan kurang terlaksana dan sebanyak 2 orang atau 16.66 % mengatakan tidak terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap struktur birokrasi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dalam kategori kurang terlaksana.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kabid. Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, diperoleh informasi bahwa:

Pelaksanaan program Adiwiyata ini, terdapat adanya suatu aturan yang menjadi petunjuk pelaksanaan. Jadi segala sesuatunya dilaksanakan sesuai aturan yang sudah diatur sebelumnya, namun tidak berarti para pelaksana menjadi kaku dalam pelaksanaannya (hasil wawancara tanggal 23 Agustus 2019)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Kampar Kiri Tengah mengenai dukungan terhadap pelaksanaan program Adiwiyata, diperoleh informasi bahwa:

Di SMPN 1 Kampar Kiri tengah pengorganisasian tim pengelola lingkungan yaitu Tim Adiwiyata yakni terdiri dari penanggung jawab program (Kepala Sekolah), ketua, sekretaris, bendahara, koordinator kegiatan dan anggota-anggota (hasil wawancara tanggal 26 Agustus 2019).

Berdasarkan uraian baik dari data kuisioner, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka penulis menarik kesimpulan bahwa struktur birokrasi pelaksanaan program adiwiyata tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar yang dinilai dari beberapa indikator yaitu: SOP dan pragmentasi sebagian item yang dinilai dapat digolongkan kedalam kategori terlaksana.

Dari analisa yang telah dilakukan diatas maka dapat ditarik rekapitulasi jawaban responden berikut ini:

Tabel V.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implementasi Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Komunikasi	6 (50 %)	4 (33.33 %)	2 (16.66 %)	12 (100 %)
2	Sumber daya	4 (33.33%)	6 (50 %)	2 (16.66%)	12 (100 %)
3	Disposisi	7 (58.33%)	4 (33.33 %)	1 (8.33 %)	12 (100 %)
4	Struktur birokrasi	5 (41.66%)	5 (41.66%)	2 (16.66%)	12 (41.76%)
	Jumlah	22	19	7	48
	Rata-rata	5	5	2	12
	Persentase	41.66 %	41.66 %	16.88 %	100 %

Sumber: Olahan Penelitian 2019.

Dari analisa pada tabel V.8 diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah

Pertama di Kabupaten Kampar dapat dikategorikan “kurang terlaksana” dengan rata-rata jawaban sebanyak 5 orang atau 41.66 % mengatakan implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar terlaksana, sebanyak 5 orang atau 41.66 % mengatakan implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar kurang terlaksana dan sebanyak 2 orang atau 16.66 % mengatakan implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar tidak terlaksana.

Berdasarkan analisis hasil akhir penelitian ini, secara keseluruhan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar kurang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi tanggapan dari responden tentang implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dari sub indikator komunikasi dalam kategori pengukuran kurang terlaksana, sumber daya dalam kategori pengukuran kurang terlaksana, disposisi dalam kategori kurang terlaksana dan struktur birokrasi juga dalam kategori kurang terlaksana.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar kurang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi tanggapan dari responden tentang implementasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kampar dari sub indikator komuniiasi dalam kategori pengukuran kurang terlaksana, sumber daya dalam kategori pengukuran kurang terlaksana, disposisi dalam kateri kurang terlaksana dan struktur birokrasi juga dalam kategori kurang terlaksana.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

- 1) Bagi dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mengevaluasi pelaksanaan program Adiwiyata agar di masa mendatang pelaksanaan program Adiwiyata ini dapat berjalan lebih baik.

- 2) Kepada pihak sekolah agar terus bekerja sama karena memiliki peranan yang sangat penting mencapai keberhasilan program adiwiyata.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Said, Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. “*Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*”. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kuper Adam & Yessica, 2000. *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rasyid M Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Mutiara Sumberdaya. Jakarta.
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Sagala, Syaiful. 2010. *Managemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Samudra, Wibawa et.al, 1994. *Evaluasi kebijakan publik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta. Kencana.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Refika Aditama. Bandung.
- Soeprbowati, Diah. *Akhlik Siswa Terhadap Alam*, Semarang: Sindur Press, 2008.

- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Refika Aditama. Bandung.
- Tanjung, Salman Husin. 2003, *Sistem Pemerintahan Desa*. Alqaprint Jatinangor. Sumedang.
- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Social*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibowo, Eddi. 2004. *Kebijakan Publik dan Budaya*, YPAPI, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. PT. Buku Seru, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.